

**PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN
METODE *SINGLE ENTRY* DAN *DOUBLE ENTRY* PADA
LEMBAGA DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN SRAGEN**

Tri Widiyanto¹, Adi Penawan², Brm Suryo Triono³
^{1,2,3}STIE "ADI UNGGUL BHIRAWA" SURAKARTA
 Email : tri.widiyanto@stie-aub.ac.id

Abstract

The Community Empowerment Trust Fund is a continuation of special activities for managing revolving fund loans after the Rural Community Empowerment Program (PNPM-MD) ended in 2014, the Rural Independent Community Empowerment Program (PNPM-MD) which was designed as an effort by the Government of Indonesia to empower rural communities in an integrated and sustainable manner. Quality and professional human resources are believed to be able to determine the vision, mission and goals of the organization, to achieve the vision, mission and objectives of the DAPM Institutional organization, especially for BKAD the need for technical training in making financial reports on the use of social funds and institutional funds that have been obtained. from the results of the Surplus Sragen Regional Financial Management Unit. The required report must be able to reflect the position of Cash Flow, Budget Realization Report and Balance Sheet so that it is easily understood in accordance with PSAK 45 concerning Public Sector Financial Statements which is strengthened by Government Regulation No. 5 of 2005 which has been updated to Government Regulation No. 7 of 2010. This service was carried out on February 17, 2020 for all BKAD Members of Sragen Regency. The training participants were 21 treasurers. This implementation is planned for 1 day with a practical simulation of making financial reports in accordance with Government Regulation No.7 of 2010 concerning public sector financial reports using single entry and double entry methods. The expected output of this training is that the participants are expected to be able to understand the function of the Sragen BKAD region and to be able to produce financial reports that are needed by management using the single entry method or the double entry method.

Key Words: *Public sector financial statements, financial statement analysis*

PENDAHULUAN

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir setelah kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) berakhir pada tahun 2014, Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) yang dirancang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MD membangun kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) beserta unit kerja yang mendukung kegiatan paska program PMPM Mandiri Perdesaan, yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV) dan Badan Pengawas (BP). Unit-unit kerja tersebut adalah lembaga pengelola dana

bergulir dengan fungsi memberdayakan masyarakat miskin dan marjinal melalui pemberian pinjaman untuk modal usaha masyarakat yang dipandang tidak *bankable* dan *visible* dari mata lembaga keuangan formal ataupun Bank dan tugas penting dari para pengelola Kegiatan DAPM adalah menjaga kelestarian serta keberlanjutan dana bergulir tersebut.

Keberdayaan kelembagaan yang telah dibangun oleh program tersebut lebih tergantung pada komitmen masyarakat dalam upaya menjaga, membangun dan mengembangkan organisasinya untuk bisa lestari dan profesional dalam mengelola dana bergulir dengan memberikan pelayanan pinjaman kepada kelompok-kelompok masyarakat, seraya secara mandiri BKAD, BP, TV dan UPK dituntut untuk mampu membiayai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir yang berkelanjutan (*sustainability*), selain itu sebagai lembaga yang memberi pinjaman kepada kelompok-kelompok yang tanpa agunan (*collateral*) dan pengembangan pola pinjaman kepada individu/*personal loan*, ini memaksa Pengelola Kegiatan DAPM harus memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, kredibilitas yang mendukung sebagai pengelola dana sehingga dapat menerapkan strategi yang tepat, efektif dan efisien dalam kerjanya.

Dari hal tersebut diatas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional diyakini mampu menentukan visi, misi dan tujuan organisasi, untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi Kelembagaan DAPM, Khususnya untuk BKAD perlunya pelatihan secara teknis dalam pembuatan Laporan Keuangan terhadap penggunaan dana sosial dan dana Kelembagaan yang telah di dapatkan dari hasil surplus Unit Pengelola Keuangan Daerah Sragen. Laporan yang dibutuhkan harus dapat mencerminkan posisi Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca agar mudah di pahami sesuai dengan PSAK 45 tentang Laporan keuangan Sektor publik yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2010. Selain itu dibutuhkan juga penataan Organisasi, pemilihan badan hukum, memperkuat struktur organisasi, menyusun aturan-aturan sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

1. Rumusan Masalah

Adapun persoalan umum yang dihadapi adalah bagaimana mempersiapkan format laporan keuangan secara komputerisasi dan kendala-kendala yang dihadapi para pelaku Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM) pada berbagai level yang masih mengalami persoalan tersebut atau kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan kemampuan/kapasitas para Pengelola dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan masyarakat yang profesional.

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan dalam membuat laporan keuangan sektor publik untuk organisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan menggunakan metode *single entry* dan *double entry*. Metode pendampingan diperlukan sehingga perlu adanya motivasi dan pelatihan agar hasil pelatihan membuat laporan keuangan ini dapat digunakan secara berkelanjutan pada kantor Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Wilayah Kabupaten Sragen.

3. Tinjauan Pustaka

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2020 di Kantor BKAD Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pukul 13.00 wib - selesai. Khalayak sasaran dalam bentuk pelatihan dan pendampingan ini adalah 21 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara Unit pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Sragen. Adapun metode yang digunakan dari kegiatan pelatihan dan pendampingan ini yaitu:

1. Metode ceramah dan penyampain materi oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) STIE-AUB Surakarta menyampaikan materi analisa laporan keuangan sektor publik berdasarkan PSAK 45 dan PP Nomor 71 tahun 2010.
2. Pelatihan Membuat Laporan keuangan yang dilakukan oleh tim Pengabdian Masyarakat (PKM) STIE-AUB Surakarta dengan contoh kasus yang telah disiapkan sebelumnya yaitu laporan keuangan riil yang masih sederhana dari BKAD Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.
3. Diskusi dan Tanya jawab, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STIE-AUB Surakarta memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk bertanya mengenai hal-hal belum jelas mengenai materi yang disampaikan.
4. Konsultasi berkelanjutan kepada tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STIE-AUB Surakarta jika masih diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu team Pengabdian Kepada Masyarakat mewujudkan melaksanakan workshop pelatihan dengan beberapa contoh kasus dalam mengerjakan laporan keuangan sesuai dengan pp no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Untuk

contoh kasus yang kami berikan adalah data dari laporan keuangan BKAD kecamatan Kalijambe yang belum menggunakan Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi anggaran. Untuk laporan keuangan pada BKAD kecamatan Kalijambe lebih tertib dan teratur dibandingkan dengan data laporan keuangan daeran lain di Kabupaten wilayah Sragen. Team kami membagi kelompok – kelompok agar tugas simulasi membuat laporan keuangan bisa dikerjakan bersama berdasarkan daerah Kecamatan masing – masing. Selain simulasi membuat laporan keuangan kami juga memberikan materi character building agar kerjasama team yang solid pada masing – masing unit kerja dapat terjalin dengan baik.

Kelas BKAD dengan Materi Pembukuan Keuangan BKAD

- a) Pengantar Akuntansi Sektor Publik
 - 1) Definisi dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik
 - 2) Organisasi Sektor Publik
 - 3) Perbedaan dan Persamaan Akuntansi Sektor Publik (Nirlaba) dan Swasta (Laba)
 - 4) Sejarah Akuntansi Sektor Publik
 - 5) Penerapan Akuntansi Sektor Publik
- b) Laporan Keuangan Sektor Publik
 - 1) Pengertian Laporan Keuangan
 - 2) Tujuan dan fungsi Laporan Keuangan
 - 3) Para Pemakai Laporan Keuangan
 - 4) Dampak Laporan Keuangan
 - 5) Bentuk-bentuk Laporan Keuangan
- c) Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Praktek Pencatatan Akuntansi BKAD
 - 1) Definisi Organisasi Nirlaba
 - 2) Laporan Keuangan Nirlaba
 - 3) Praktek Pencatatan Transaksi pada buku Kas Harian BKAD dengan model *Single Entry*
- d) Praktek Pencatatan Akuntansi BKAD
 - 1) Lanjutan Praktek Pencatatan Transaksi pada buku Kas Harian BKAD dengan model *Single Entry*
 - 2) Pencatatan Inventaris
 - 3) Penyusunan Neraca
- e) Praktek Pencatatan Akuntansi BKAD
 - 1) Penyusunan Laba/Rugi
 - 2) Penyusunan *Cash flow*

Luaran yang diharapkan dari pelatihan pembuatan laporan keuangan ini diharapkan Pengelola kegiatan dana amanah pemberdayaan Masyarakat sudah mampu memahami dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yaitu PP no 71 tahun 2010 tentang keuangan sektok publik.

Dalam membuat laporan keuangan bilamana tidak sesuai dengan standar yang ada maka dapat terjadi hal-hal buruk yang dapat membuat pembaca laporan keuangan sulit memahami dan mengambil keputusan. Dampak jika laporan keuangan organisasi sektor publik buruk diantaranya adalah :

- a) Kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik { pemerintah } akan menurun.
- b) Para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
- c) Mempengaruhi pengambilan keputusan.
- d) Laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja.
- e) Laporan keuangan tidak dapat diaudit

Oleh karena banyak dampak buruk jika pembuatan laporan keuangan tidak dilakukan berdasarkan standar yang ada, maka ada beberapa tujuan dalam pembuatan laporan keuangan diantaranya adalah :

- a) Kepatuhan dan pengelolaan Laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
- b) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- c) Perencanaan dan informasi otorisasi Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
- d) Kelangsungan organisasi Laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa { pelayanan } di masa yang akan datang.
- e) Hubungan masyarakat Laporan keuangan dapat memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- f) Sumber fakta dan gambaran { *source of facts and figures* } :Laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintah adalah : Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintah.

SIMPULAN

Dengan adanya pelatihan pembuatan laporan keuangan sektor public secara single entry dan double entry pada lembaga unit pengelola kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Sragen diharapkan pada organisasi BKAD pada unit DAPM dapat membuat laporan keuangan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan PP no 71 tahun 2010.

Setelah diadakan pelatihan pembuatan laporan keuangan sektor publik dan peserta telah dapat membuat laporan keuangan yang benar maka diharapkan tidak ada lagi dana dari pemerintah yang tidak efektif dan efisien dalam pengelolaannya terhadap masyarakat.

Dengan diadakan pelatihan ini semoga dapat merubah pemikiran terhadap masyarakat terkait penggunaan dan pengelolaan dana yang ada pada lembaga pemerintahan khususnya pada organisasi Badan Kerjasama Antar Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah dan Haris Budiyo. 2004. "Pengantar Manajemen". Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dewi, Shanti Nugrahani. 2011. E-Commerce Untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil Dan Menengah. *SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis*. No 1,–Januari
- Hasibuan*, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Indrajit, 2001, *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*. Bandung: Informatika.
- Mariana Kristiyanti, 2012. "Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Strategi Menghadapi Persaingan Global", *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, Vol. 3, No. 2, Hal. 93-116
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S, 2007, *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat, Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Widjajanto, Nugroho, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Erlangga PSAK 45 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Laporan keuangan sektor publik